

TESIS

**TELAAH KRITIS JURGEN HABERMAS PADA PRAKTIK
AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PLTA BAKARU**

***CRITICAL STUDY JURGEN HABERMAS'S ON THE
PRACTICE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
ACCOUNTING AT THE BAKARU HYDROPOWER PLANT***

Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister

Disusun dan Diajukan Oleh

YAHYA

A062191008



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

TELAAH KRITIS JURGEN HABERMAS PADA PRAKTIK AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI PLTA BAKARU

Disusun dan diajukan oleh

Yahya

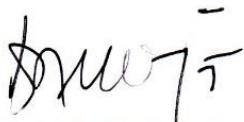
A062191008

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **07 September 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Ketua

Anggota



Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA.
NIP.195607221987021001



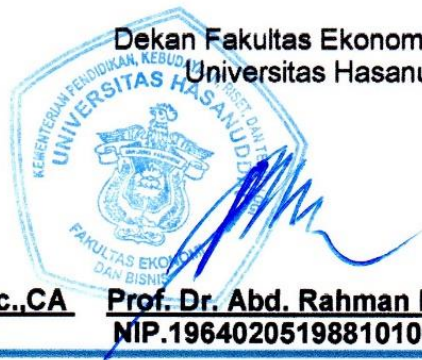
Dr. R. A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP.196509251990022001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP.196703191992032003



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP.196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yahya

NIM : A062191008

Jurusan/Program Studi : Magister Sains Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya nya bahwa tesis yang saya tulis dengan Judul **“Telaah Kritis Jurgen Habermas Pada Praktik Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Di PLTA Bakaru”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain. kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa didalam tesis ini terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU no 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 26 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Yahya

PRAKATA

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmatnya. Senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, kelapangan, kekuatan, kesempatan serta ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada program studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Selama proses penyusunan tesis ini banyak kendala yang peneliti hadapi, disamping keterbatasan peneliti sendiri. Namun berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak sehingga akhirnya tesis ini dapat dirampungkan. Atas bantuan dan partisipasinya dari berbagai pihak izinkan peneliti menyampaikan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Darwis Said, SE.,Ak.,M.S,A selaku Ketua Komisi Penasehat dan Dr. R. A. Damayanti,SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA selaku anggota komisi penasehat yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya tesis.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,M.Soc.Sc.Ak. CA., Ibu Prof. Dr mediaty, SE.,Ak.,M.Si., CA dan Prof. Dr Kartini SE.,Ak.,M.Si.,CA. sebagai tim penilai seminar usulan Proposal sampai pada seminar hasil penelitian tesis.
3. Ucapan terima kasih kepada Dr. R. A. Damayanti,SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si.,SE.,M.Si.; Bapak Dr. Alimuddin, SE.,MM,Ak.; Bapak Dr. Yohanis Rura SE.,M.Si.,Ak.; Ibu Dr.Grace T. Pontoh SE.,M.Si.,Ak dan seluruh bapak/ibu Dosen yang tidak sempat saya sebutkan

yang telah memberikan ilmu serta bapak/ibu staf administrasi pada Program Magister Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh kuliah sampai selesai.

4. Pihak PT. PLN UIKL Sulawesi UPDK Bakaru, Bapak Fatahuddin Yogi Amibowo, yang telah memberikan persetujuan izin penelitian di PLTA Bakaru.
5. Seluruh rekan-rekan kuliah program magister sains akuntansi Universitas Hasanuddin angkatan 2019 tanpa terkecuali yang telah berjuang bersama-sama dengan peneliti.
6. Tidak terkecuali kedua Orang-tuaku yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada peneliti.
7. Semua pihak-pihak yang peneliti tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dengan tulus mulai dari proses perkuliahan sampai penyusunan tesis ini. Peneliti menyadari bahwa tesis ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, peneliti akan menerima segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi perbaikan tesis ini. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 26 Oktober 2021

Yahya

ABSTRAK

Telaah Kritis Jurgen Habermas Pada Praktik Akuntansi Sosial dan Lingkungan Di PLTA Bakaru

Yahya¹
Darwis Said²
R.A. Damayanti³

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis praktik akuntansi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PLTA Bakaru berdasarkan perspektif Jurgen Habermas, penelitian ini dilaksanakan di PLTA Bakaru dengan mengambil informan karyawan dan masyarakat lokal sekitar perusahaan, informan dalam penelitian adalah yang memiliki pemahaman yang baik terkait problem yang diangkat dalam penelitian, mengumpulkan data melalui pengamatan dan dokumentasi dalam berbagai situasi di lapangan, data dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan *theory of communicative action* kritis Jurgen Habermas untuk meninjau realitas praktik akuntansi sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sosial dan lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat, hal ini disebabkan karena minimnya program tanggung jawab perusahaan (CSR) yang dikeluarkan oleh PLTA Bakaru, program yang banyak terlaksana masih bersifat bantuan dan belum berorientasi pada keberlanjutan dalam menyediakan pelaporan pencegahan dan pemeliharaan kegiatan lingkungan.

kata kunci : akuntansi sosial dan lingkungan, kritis, csr disclosure, communicative action, alokasi anggaran, akuntabilitas

ABSTRACT

Jurgen Habermas's Critical Study on Social and Environmental Accounting Practices at the Bakaru Hydroelectric Power PLANT

Yahya¹
Darwis Said²
R.A. Damayanti³

This study aims to critically examine the social and environmental accounting practices carried out by the Bakaru Hydropower Plant based on the perspective of Jurgen Habermas, this research was carried out at the Bakaru Hydropower Plant by taking informants from employees and the local community around the company. appointed in the study, collecting data through observation and documentation in various situations in the field, data were analyzed with a qualitative approach using Jurgen Habermas' critical Theory of Communicative Action to review the reality of social and environmental accounting practices. The results of the study show that the application of social and environmental accounting through CSR performance has not been fully felt by the surrounding community as beneficiaries, this is due to the lack of corporate responsibility (CSR) programs issued by PLTA Bakaru, the programs that are mostly implemented are still aid and not oriented. on sustainability in providing reporting on prevention and maintenance of environmental activities. keywords: social and environmental accounting, critical, csr disclosure, communicative action, budget allocation

keywords: social and environmental accounting, critical, csr disclosure, communicative action, budget allocation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
HALAMAN USULAN TESIS	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Motivasi Penelitian	10
1.3 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORI	13
2.1 Akuntansi; Teori Kritis Jurgen Habermas.....	13
2.2 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	15
2.3 CSR <i>Disclousare: Theory of Communicative Action</i>	16
2.4 konsep keadilan dalam Praktik Akuntansi.....	17
2.5 Teori Tindakan Strategis dan Komunikatif jurgen Habermas.....	18
2.6 Konsep Tanggung Jawab sosial Perusahaan	22
2.7 Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian	25
3.2 Sumber Data dan Informan	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.3.1 Situs Penelitian	28
3.4 Teknik Analisis Data	28
3.5 Residu Data dan Penyajian Data	30
3.6 Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB IV KEBERAGAMAN TANAH BAKARU: JALAN PANJANG MENDUDUKI SITUS PENELITIAN	33
4.1 gambaran Umum PLTA Bakaru	33
4.1.1 Visi PLTA Bakaru	35
4.1.2 Misi PLTA Bakaru	35
4.1.3 Motto PT PLN	35

4.1.4	Perkembangan Perusahaan	36
4.2	Struktur Perusahaan PLTA Bakaru.....	37
4.2.1	Manajer PLTA Bakaru	38
4.2.2	Bagian Operasi	38
4.2.3	Bagian Pemeliharaan.....	39
4.2.4	Bagian Administrasi Umum.....	39
4.2.5	Pejabat Pelaksana Lingkungan	40
4.2.6	Pejabat Pelaksana K3 dan Keamanan.....	40
BAB V	KILOMETER-KILOMETER PANJANG	41
5.1	Kilometer-Kilometer Panjang.....	41
5.2	Obsevasi dan Pembangunan Relasi Di Tanah Bakaru	43
5.3	Nilai-Nilai Kearifan Lokal Ditanah Bakaru	44
BAB VI	KONSEP PENERAPAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY.....	47
6.1	Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	47
6.2	Pelaporan Akuntansi Sosial dan Lingkungan	49
BAB VII	PROBLEMATIKA PENERAPAN CORPORETE SOCIAL RESPONSIBILITY PLTA BAKARU.....	52
7.1	<i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Bingkai Pemberdayaan Masyarakat	52
7.1.1	Informasi Internal CSR Tidak Mencerminkan Realitas Aktivitas Yang Sebenarnya	54
7.1.2	Akuntabilitas CSR Tidak Lahir Dari Akuntan Sebagai Penyedia Informasi	55
7.2	Implementasi SCR; Antara Harapan dan Kenyataan	57
7.3	Citra PLTA Pada Masyarakat Bakaru Setelah Implementasi Program CSR.....	59
7.4	Perdebatan Implementasi CSR Di Tanah Bakaru	62
BAB VIII	PRAKTIK AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF JURGEN HABERMAS.....	66
8.1	<i>Theory of Communicative Action</i> ; Pengungkapan CSR PLTA Bakaru	66
8.2	kritik Jurgen Habermas Dalam Praktik Pelaporan Akuntansi Sosial dan Lingkungan.....	68
8.3	<i>Communication Action</i> Dalam Penerapan CSR	70
8.4	Model Komunikasi Partisipatif PLTA Bakaru	77
BAB XI	PENUTUP	78
9.1	Kesimpulan	78
9.2	Inplikasi Penelitian	79
9.3	Keterbatasan Penelitian	79
9.4	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Realisasi Program CSR PLTA Bakaru tahun 2019..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lampiran Biodata Diri	90
2. Persetujuan Izin Penelitian	91
3. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah tantangan penelusuran praktik akuntansi sosial dan lingkungan dalam pengelolaan kinerja *Corporate social responsibility* (CSR), seperti yang diketahui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat diterjemahkan ke dalam kinerja keuangan perusahaan yang positif (Jeongmin Yu *et al.*, 2016; Rashid, 2018) ,dan menjadi bagian pelaporan sosial dan lingkungan yang memiliki perananan penting dalam menjaga atau menciptakan legitimasi organisasi (Deegan, 2018). Mengingat seberapa banyaknya yang diberikan perusahaan untuk belanja CSR maka akan melahirkan persepsi ketidakadilan dari pemangku kepentingan yang terbentuk dari alokasi belanja yang lebih kecil, hal ini dinilai tidak profesional dibandingkan dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan (Tarabashkina *et al.*, 2020). Sedangkan perusahaan yang membelanjakan lebih banyak untuk CSR akan mengalami peningkatan pendapatan dan profitabilitas yang sesuai (Yuliana, 2019; Adusei *et al.*, 2021). Karena pertentangan ini, menjadikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan pada implementasi CSR membutuhkan harapan semua pemangku kepentingan dan lingkungan untuk dipertimbangkan (Rozanka *et al.*, 2015).

Corporate social responsibility membutuhkan seperangkat solusi dalam bidang akuntansi untuk mengatasi aspek sosial, etika, dan ekologi dalam operasi bisnis. Saat ini, isu yang sangat hangat di kalangan akademik, seperti perlunya *good governance* (Welford, 2007; Bakre *et al.*, 2016; dan Rashid, 2018). Sedangkan menurut Freedman (1994) menyebutkan terdapat sembilan area CSR yang semestinya menjadi fokus utama yaitu, *ethics*, tata kelola,

transparansi, relasi bisnis, *financial return*, keterlibatan masyarakat, nilai produk, pelatihan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Namun yang terjadi justru lebih banyak mengabaikan hal tersebut, terlihat dari perilaku kebanyakan perusahaan yang didasarkan pada keuntungan dari pada keterlibatan dengan masyarakat (Achda, 2006). Perusahaan lebih fokus pada program CSR yang bertentangan dengan penyediaan data kinerja yang menunjukkan pelaporannya lebih pada peningkatan citra daripada akuntabilitas transparan (Zhao Na *et al.*, 2019).

Berdasarkan kajian literatur akuntansi, menekankan bagaimana akuntansi, khususnya dalam hal pelaporan perusahaan terkait erat dengan konsep CSR (Róžańska *et al.*, 2015; Shrives P.J *et al.*, 2010; Sinclair *et al.*, 2001). Berbagai penelitian internasional membahas Pengukuran kinerja tata kelola perusahaan, komunikasi CSR dan menekankan pada aspek tertentu pada pelaporan lingkungan (Magnan *et al.*, 2004; Mowen. 2005; Deegan, 2002; Krzus, 2010; O'Dwyer *et al.*, 2007; Ervits, 2021; Jun Wang, 2021; Abhayawansa, 2021). Studi-studi ini yang berfokus pada CSR *disclosure* yang lebih banyak (Deegan, 2002; W. Roberts *et al.*, 2015; Ervits, 2021; Jun Wang, 2021). Menurut Reverte (2009) tiga jenis studi CSR *disclosure* yakni, berkaitan dengan studi deskriptif yang menganalisis sifat dan tingkat CSR *disclosure* dan membuat perbandingan antara negara pada periode waktu yang berbeda, tipe kedua didasarkan pada studi eksploratif yang memperhatikan faktor-faktor penentu sosial dan pengungkapan lingkungan dan ketiga berfokus pada dampak informasi sosial dan lingkungan.

Penelitian ini fokus mengatasi CSR *disclosure* PLTA Bakaru dengan mengangkat isu-isu terkait transparansi, akuntabilitas, alokasi anggaran, dan kelestarian lingkungan yang ditinjau dari teori kritis Jurgen Habermas, untuk melihat hubungan antara kinerja lingkungan perusahaan dan pengungkapan

CSR dengan mengangkat kebenaran (Jun Wang, 2021). Berbagai perspektif akuntabilitas yang berkembang belakangan ini, memungkinkan untuk mengkonstruksi penerapan kebijakan CSR yang humanis, spiritualis, bernilai kearifan lokal, dan partisipatif, dengan kata lain bagaimana suatu organisasi menggunakan motif melayani diri sendiri dan melayani pemangku kepentingan dalam komunikasi CSR mereka terkait alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (Yuliana, 2019) dengan menilai efek-efek dampak informasi sosial dan lingkungan pada kinerja keuangan (Mmutle *et al.*, 2020; Soetrisno, 2021).

CSR sebuah proses mengkomunikasikan mengenai dampak sosial dan lingkungan yang menjadi bagian dari metode sistem pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi lingkungan terkait dampak-dampak *finansial* dan ekologis dari suatu sistem ekonomi korporasi (Gray *et al.*, 1987; Elkington, 1997; Schaltegger *et al.*, 1996; Darus *et al.*, 2018). Studi internasional berusaha untuk menghasilkan laporan yang dapat dibenarkan sebagai refleksi yang kredibel dari kinerja CSR yang memungkinkan akan meningkatkan legitimasi organisasi (Hickman *et al.*, 2019) yang masih dianggap gagal dalam memberikan informasi yang relevan untuk menilai perusahaan (W. Roberts *et al.*, 2015). Oleh sebab itu, perusahaan perlu memiliki sikap positif berkaitan dengan CSR, dan secara proaktif mengintegrasikan aspek yang sesuai ke dalam mekanisme pengendalian internal mereka, sehingga memungkinkan perusahaan dapat mengarahkan tindakan terkait CSR mereka, untuk mencapai efek kinerja yang positif (Weissenberger *et al.*, 2021).

Studi sebelumnya telah banyak menggambarkan dan mendeskripsikan berkaitan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan dalam praktik akuntansi melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti yang di ungkap oleh (Broadstock *et al.*, 2019; Kurniawan *et al.*, 2018; Syarifuddin and Damayanti, 2019) bahwa strategi kebijakan penerapan CSR adalah komitmen perusahaan

untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang santun dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan untuk menghindari ancaman paling kritis dari lingkungan global dan perubahan iklim, inilah menjadi perhatian yang signifikan karena berdampak pada kehidupan di bumi (Darus, 2014).

Bagaimana perkembangan kisah CSR di negara berkembang seperti Indonesia. Secara implementatif perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak seperti pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan temuan Williams (2015) bahwa pengungkapan CSR yang hanya 9% perusahaan mengungkapkan *sustainability report* di Bursa efek Indonesia, seperti industri batubara dan pertambangan. Meskipun perusahaan telah mengungkapkan pelaporan berkelanjutan CSR untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Namun, kinerja CSR di Indonesia cukup mengejutkan karena masih menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti sikap negatif pemangku kepentingan mengenai transparansi dan kinerja CSR di PLTA Bakaru yang dianggap tidak dapat menjawab kesenjangan sosial ekonomi mereka, padahal kelompok orang yang tinggal dan bekerja di wilayah yang secara ekonomi, sosial, atau lingkungan terkena dampak (positif maupun negatif) dari operasi organisasi, ini sejalan dengan standar pelaporan keberlanjutan (GRI-413). Oleh sebab itu, perusahaan perlu menunjukkan bukti secara nyata bahwa yang dilakukan merupakan komitmen, tidak hanya anggapan bahwa CSR sebatas kewajiban yang harus ditaati karena merupakan perintah UU yang ada di Indonesia (Resnawaty *et al.*, 2019; Widokart, 2014). Perlu pengolahan aliran informasi diantara mereka untuk mengartikulasikan kepentingan publik kepada organisasi dan memastikan implementasi kinerja CSR untuk keuntungan kedua belah pihak (Juwita, 2016). Maka penelitian ini penting mengungkap sifat jalinan

akuntansi dalam menempatkan manusia dalam fenomena sosial, budaya, dan lingkungan tertentu.

Berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan (GRI-413) tahun 2016 masyarakat lokal sebagai petunjuk untuk digunakan oleh organisasi-organisasi untuk melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat". Ada dua pilihan dalam mempersiapkan laporan yang sesuai (inti atau komprehensif), bergantung pada pengungkapan yang tercakup dalam laporan yang menyertakan klaim yang merujuk pada GRI, seperti pelaporan program pengembangan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan menilai perencanaan untuk memahami dampak aktual dan potensial, serta keterlibatan yang kuat dengan masyarakat lokal untuk memahami harapan, dan kebutuhan mereka. Pengungkapan ini berupaya untuk mengidentifikasi elemen mana yang telah secara konsisten diterapkan di keseluruhan organisasi, dan pengungkapan publik atas hasil penilaian dampak lingkungan, serta dampak sosial.

Jurgen Habermas lebih condong mengambil konsep sintesis dari Marx, yakni keterkaitan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Sintesis ini dimungkinkan oleh kategori tindakan manusia dalam lingkungannya, yaitu kategori tindakan instrumental yang terdapat dalam hubungan antara manusia dan alam. Kategori tindakan komunikatif yang terdapat dalam hubungan seperti perusahaan dengan masyarakat. Menurut Outhwaite (2016) bahwa aspek CSR yang semakin penting dalam pengakuannya bahwa praktik yang sehat seringkali didasarkan pada standar tata kelola perusahaan. Perusahaan yang baik tata kelola memberikan dasar-dasar CSR yang baik dengan menciptakan nilai hubungan dengan semua pemangku kepentingan, pada dasarnya CSR diterapkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (Said *et al.*, 2020).

Berkaitan dengan teori *Communicative Action Habermas*, bahwa interaksi sosial dapat terjadi melalui dua cara, yakni dunia kehidupan dan mekanisme sistem. *Lifeworld* dapat disederhanakan menjadi kegiatan kelompok sosial yang terkoordinasi karena proses harmonisasi dari kesamaan tujuan, harapan, keinginan, dan tindakan lain yang selaras. Sedangkan interaksi sosial lainnya, yaitu mekanisme sistem yang terjadi karena pengaruh sistem kehidupan sosial terstruktur dalam masyarakat. Interaksi sosial yang dipengaruhi oleh mekanisme suatu sistem dapat terjadi melalui peraturan, norma sosial, kesepakatan sosial, dan sebagainya. Proses sosial ini masih dipengaruhi oleh media *steering*, ada dua media pengarah yang sangat berpengaruh di masyarakat, yaitu media uang dan media *power*. Dalam pengertian itu, ia menggambarkan konsep-konsep dasar seperti tindakan sosial, kepentingan dunia kehidupan, sistem sosial, dan sebagai pengaturan komunikasi.

The Theory of Communicative Action Habermas mengembangkan teorinya mengenai perkembangan masyarakat yang dianggap pada hakikatnya komunikatif, bahwa yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan produksi atau teknologi, melainkan proses belajar dalam dimensi praktis dan etis. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat terlebih dahulu sampai pada tahap konsensus, dimana masyarakat harus melakukan proses komunikasi yang memuaskan.

Menelusuri aktivitas sosial dan lingkungan, maka perlu melihat dari karakteristik akuntansi yang timbul, tentunya tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan pengukuran dan pelaporan terhadap dampak akibat dari aktivitas yang telah dilakukan (*externalities*). Sejauh ini, akuntansi konvensional tidak mampu menampung masalah *externalities*, karena segala sesuatunya diukur dengan nilai ekonomi perusahaan dan bukan nilai ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu standar akuntansi yang dapat dipergunakan

untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, paling tidak ada upaya tindakan untuk pengembangan konsep baru dan penyusunan standar akuntansi untuk menampung masalah akibat fenomena praktik akuntansi sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, pelaporan akuntansi diharapkan dapat mengakomodasi segala kepentingan sosial dan digunakan untuk merencanakan kebijakan yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban sosial agar dapat memajukan ekonomi masyarakat, sebagaimana pemikiran kritis Habermas merasa diri bertanggung jawab terhadap keadaan sosial yang nyata dalam usahanya melakukan perubahan sosial (Sudrajat, 2017).

Pada hakikatnya ilmu akuntansi seharusnya mampu membawa nilai-nilai etika dan moral, namun sering diabaikan karena kebiasaan mengedepankan rasionalitas dan intelektualitas (Sylvia, 2014). Praktik akuntansi sosial dan lingkungan mulai muncul sebagai jawaban atas tuntutan adanya kerusakan sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan, akuntansi sosial, dan lingkungan diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dalam tindakan pengelolaan lingkungan yang baik. Namun, pada faktanya laporan keuangan hanya difokuskan kepada kepentingan investor, dan kreditor sebagai pemakai utama laporan keuangan. Hal ini, dimuat pada standar *financial accounting concepts* (SFAC) No.1. Kalau diperhatikan lebih dalam bahwa penggunaan informasi akuntansi tidak hanya terbatas pada pemegang saham. Sejauh ini perusahaan hanya mengungkapkan informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan yang dianggap perlu, dan mengabaikan pelaporan yang berkaitan dengan polusi udara, pencemaran air, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Akuntansi yang bersifat konvensional dalam skala nasional gagal dalam mencatat depresiasi atas kekayaan alam seperti air, udara dan gas alam (Utama, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai penegasan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan undang-undang tersebut, otoritas jasa keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terbaru OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan perusahaan publik untuk mengembangkan dan memantau ekonomi lingkungan termasuk didalamnya adalah kebijakan yang peduli terhadap sosial dan lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-Bank. Sehingga pelaporan dan pengungkapan praktik akuntansi adalah kewajiban bagi perusahaan di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-Bank.

Indonesia juga menerapkan undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dimana undang-undang penanaman modal (UUPM) pasal 15 huruf b dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). UUPM memberikan definisi penanam modal meliputi perseorangan warga negara indonesia dan warga negara asing (WNI dan WNA) yang melakukan penanaman modal dalam negeri maupun asing. Penjelasan tersebut disebutkan bahwa tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal sebagai upaya menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. UUPM justru memberikan aturan tentang sanksi jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban ini, antara lain; pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha .

Hal yang lain adalah pertanggung jawaban sosial dan lingkungan dengan mengungkapkan pinjaman mikro berbasis lokal yang ada di Sumba terkait untuk praktik penghijauan. Layanan pinjaman mikro sejauh ini mengikuti pelestarian lingkungan seperti daur ulang dan ini dapat meningkatkan sumber pencaharian

masyarakat. Misalnya mendorong anggota untuk menggunakan tanah, mendukung kegiatan reboisasi, mendorong anggota untuk berkembang apotek tanaman, mempromosikan cara untuk mendaur ulang, dan berpartisipasi dalam mengurangi pembakaran hutan. Bangladesh dan Kanada pinjaman dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan dengan mendaur ulang limbah, menghasilkan listrik, bekerja sama dengan organisasi untuk membantu mempromosikan program daur ulang, dan perbaikan untuk digunakan kembali (Rouf, 2012). Sedangkan di Amerika Latin dan Karibia pemanfaatan keuangan mikro lebih efisien untuk mengurangi iklim dan risiko lingkungan untuk rumah tangga yang berpendapatan sangat rendah, hal ini sebuah inovatif *platform* yang berorientasi lingkungan untuk ekonomi ekologis berpusat pada komunitas (Forcella *et al.*, 2017).

Adapun organisasi pengembangan industri perserikatan bangsa-bangsa (UNIDO) melaporkan bahwa bisnis India secara tradisional dan mempraktikkan CSR sebagai alasan kesejahteraan minimal didalam suatu negara, mereka mencatat bahwa ini bergeser ke arah CSR gaya barat dengan mengukur dan mengelola dampak lingkungan dan sosial (Forstater *et al.*, 2002). Lebih pada laporan terbaru Konfederasi Industri India (2013) menunjukkan bahwa CSR semakin meningkat strategis dialam daripada sekadar *filantropis* (Ciliberti *et al.*, 2008) dalam menyelidiki hambatan untuk mengintegrasikan CSR di negara negara berkembang dan menemukan ada berbagai masalah, termasuk kurangnya pengetahuan tentang undang-undang, perbedaan budaya, rendahnya minat perusahaan dan buruk komunikasi serta korupsi.

Berbeda yang diungkap oleh Killian (2014) bahwa keberadaan dan operasi bisnis multinasional di negara berkembang masih menjadi isu kontroversial seiring dengan perkembangan praktek bisnisnya, perusahaan multinasional semakin terlibat dalam proses pembangunan suatu negara, termasuk dalam

pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR). Kendati telah banyak studi yang dilakukan terkait CSR. Tetapi tidak banyak studi yang membahas mengenai model CSR negara berkembang, dikarenakan mayoritas model CSR dikembangkan dari filosofi bisnis model negara maju terdapat beberapa karakteristik yang serupa antara negara berkembang. Terdapat beberapa faktor seperti politik dan sosiokultural yang sangat berbeda sehingga sangat sulit menghasilkan model CSR yang sifatnya universal. Karenanya, dalam implementasi CSR di negara berkembang yang harus menjadi perhatian utama adalah elemen politik dan sosiokultural dan bukan hanya fokus pada elemen ekonomi.

Riset ini akan dilakukan evaluasi sebagai upaya bagi perusahaan mendorong kemampuan meminimalisir persoalan sosial dan lingkungan yang dihadapinya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan dengan melakukan kajian "Telaah Kritis Jurgen Habermas Pada Praktik Akuntansi Sosial dan Lingkungan Di PLTA Bakaru" sebagai penilaian kegiatan sosial dan lingkungan dari sudut pandang sosial ekologi meliputi *environmental costs* dan manfaat *efek economic benefit* terutama dalam pelaporan pencegahan dan pemeliharaan kegiatan lingkungan sehingga hasil yang lebih relevan dapat ditentukan penulis untuk menganalisis lebih mendalam praktik pertanggungjawaban perusahaan dengan memasukkan kajian teori kritis Jurgen Habermas sebagai kaca mata peneliti dengan tujuan mengungkap praktik akuntansi sosial dan lingkungan. Selain itu, riset yang diajukan dapat menjadi pedoman untuk mendorong peneliti dalam upaya untuk mengembangkan pengaruh ilmu akuntansi dalam meningkatkan kinerja CSR yang berkelanjutan.

1.2 Motivasi Penelitian

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan bidang ilmu akuntansi, manusia memiliki banyak perspektif untuk menjelaskan pengetahuannya dan mengembangkannya. Saat ini, dengan begitu pentingnya mengembangkan Ilmu akuntansi maka sangat perlu mengungkap konsep akuntansi sosial dan lingkungan berdasarkan perspektif tinjauan kritis Jurgen Habermas dengan membentuk realitas sosial sebagai praktik pelaporan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dan menggunakan nilai budaya kearifan lokal sebagai prinsip utama dalam pengelolaan lingkungan dan mengaitkan teori analisis Habermas yang berbicara secara normatif mengenai bagaimana mencapai kehidupan yang lebih humanis dalam masyarakat. Tujuannya untuk membuktikan bahwa kultur atau kearifan lokal yang dimiliki memberikan pengaruh yang besar pada kemajuan sosial dan perlindungan lingkungan. Sehingga nilai-nilai budaya tersebut turut serta mempengaruhi pembentukan karakter ilmu akuntansi. Dengan kata lain, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang sangat kompleks dan program pertanggung jawaban perusahaan atas sosial dan lingkungan bisa dilakukan evaluasi dengan baik.

1.3 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Akuntansi sosial dan lingkungan sebagai ilmu yang penting dalam suatu entitas usaha yang dijalankan oleh pengembang bisnis dan mendorong kemajuan pada ruang lingkup kemakmuran pada masyarakat dan ekosistem lingkungan tetap terjaga dan mengutamakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia yang berkepanjangan. Peneliti tertarik untuk mengembangkan teori dalam mendorong praktik yang dapat membantu transformasi akuntansi dalam konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas

menuju masyarakat yang lebih adil secara sosial. Atas dasar pernyataan sebelumnya sehingga fokus studi ini memperbarui dan memperluas kerangka yang lebih kaya agar terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang memiliki karakteristik bernilai dan membawa perubahan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sehingga rumusan masalah yang dilakukan untuk pengkajian lebih mendalam Bagaimana kritis Jurgen Habermas pada praktik akuntansi sosial dan lingkungan di PLTA Bakaru ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk menganalisis praktik akuntansi sosial dan lingkungan berdasarkan perspektif Jurgen Habermas di PLTA Bakaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut ini;

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh perusahaan mengenai pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dengan perspektif kajian teori kritis habermas sebagai informasi dan pedoman pengambilan keputusan.
2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana baru untuk mempertimbangkan aspek yang perlu diperhitungkan dalam mengambil kebijakan dan penerapan memahami konsep akuntansi sosial dan lingkungan atas aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh dan juga mendapatkan manfaat besar bagi penulis dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dibidang ilmu akuntansi sosial dan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Akuntansi; Teori Kritis Jurgen Habermas

Teori kritis Jurgen Habermas bertujuan untuk melakukan perubahan sosial emansipatoris dan menggunakan analisis historis tentang apa yang memotivasi perubahan tersebut. Dalam hal ini, teori kritis secara eksplisit untuk menganalisis aktivitas yang bebas nilai, tetapi dilakukan dengan tujuan tertentu dalam pikiran sebagai upaya untuk kemajuan masyarakat yang memungkinkan dapat mendorong pembangunan bersama menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bebas dan lebih adil (Laughlin, 1987). Teori kritis mengedepankan kapasitas orang untuk mendorong perubahan sosial, meskipun tunduk pada kendala sosial seperti kekuasaan politik dan kelembagaan yang represif menekankan agensi manusia pada jalan tengah antara teori sosial yang sangat strukturalis dan yang sangat interpretatif.

Laughlin (1987) mengatakan untuk memindahkan penelitian akuntansi di luar akuntansi tradisional seperti akuntansi sosial dan lingkungan dengan pandangan rasional kekuasaan pemerintah, dia memahami akuntansi dan konteksnya sebagai sesuatu yang lebih sempit. Dalam menerapkan dan memperluas teori kritis Jurgen Habermas dengan mendorong sistem akuntansi dan akuntabilitas yang lebih memungkinkan akan mengungkap keadilan yang lebih sistematis mengenai hubungan kekuasaan perusahaan dengan ruang publik (*lifeworld*). Untuk mengidentifikasi gagasan Jurgen Habermas yang mewakili elemen inti dari karya Laughlin yakni metodologi filosofis untuk melakukan penelitian yang memandu perumusan Laughlin tentang pemikiran jarak menengah sebagai proses penelitian yang pertama adalah kritis generasi, proses

pencerahan, dan pemilihan strategi (Laughlin 1997). Elemen inti kedua adalah teori tindakan komunikasi dan pidato ideal yang terkait situasi yang menyediakan proses universal di mana konsensus dicapai mengenai tindakan yang tepat untuk diambil.

Menurut Laughlin (1997) bahwa prosesnya mengharuskan menyediakan mekanisme di mana teori kerangka dikembangkan atau disesuaikan dan disempurnakan secara diskursif dalam *setting* empiris tertentu. Evaluasi dan kemungkinan perubahan selanjutnya adalah hasil konsensus musyawarah tindakan komunikatif dilakukan dalam parameter situasi pidato yang ideal. Secara epistemologis tindakan komunikatif didasarkan pada perspektif proseduralis di mana Jurgen Habermas dimaksudkan untuk mengidentifikasi rasionalitas dan proses universal yang menggerakkan kompetisi kooperatif untuk argumen yang lebih baik, di mana orientasi pada tujuan kesepakatan yang dicapai secara komunikatif menyatukan persepsi sejak awal. Prinsip-prinsip normatif Jurgen Habermas tidak diperlakukan sebagai universal yang tidak dapat disangkal, orang-orang diakui sebagai makhluk sosial yang tertanam dalam struktur diskursif yang seringkali memerlukan pembacaan yang berbeda dari yang disepakati secara luas, seperti konsep akuntabilitas, efisiensi, kekayaan, demokrasi, kebebasan dan kesetaraan. Sementara beberapa tingkat kesepakatan diperlukan dalam hubungan demokratis, misalnya komitmen bersama untuk prinsip-prinsip etika seperti kesetaraan dan kebebasan (Dillard, 2013).

2.2 Urgensi Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Riset yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan akuntan oleh stakeholders yang membutuhkan pengembangan bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Akuntansi berperan aktif proses penyusunan dan pelaporan bisnis,

mulai dari pelaporan keuangan hingga pelaporan non keuangan seperti laporan keberlanjutan. Menurut (Kusumawardani *et al.*, 2017) bahwa secara internasional pelaporan yang berkelanjutan akan memberikan dorongan untuk mempersiapkan mahasiswa akuntansi dalam memahami persoalan akuntansi sosial dan lingkungan maka pendidikan akuntansi sosial dan lingkungan menjadi hal yang penting di perguruan tinggi.

Sebelumnya yang menjadi primadona hanyalah pelaporan keuangan tahunan perusahaan saja, namun sekarang telah ditambah lagi dengan hadirnya laporan keberlanjutan sebagai respon atas isu tersebut, maka perkembangan dalam laporan keberlanjutan menjadi bagian dari masa depan pelaporan dalam membantu stakeholder dan akademisi untuk memiliki wawasan tentang pelaporan keberlanjutan tersebut (Khairin, 2017).

2.3 CSR Disclosure: Theory of Communicative Action

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut CSR *disclosure* adalah suatu proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat (Said *et al.*, 2020). Akuntansi sosial difokuskan pada aspek sosial atau dampak (*externalities*) dari kegiatan pemerintah maupun perusahaan yang justru menimbulkan penyakit sosial seperti kerusakan ekosistem, polusi, kriminal, monopoli, keterbelakangan desa, meningkatnya utang, diskriminasi, kemiskinan (Armono, 2008).

Dalam bukunya *the theory of communicative action*, Jurgen Habermas menyebut empat macam klaim, kalau ada kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif berarti mencapai "klaim kebenaran" (*truth*) yakni CSR wujud pertanggungjawaban perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan, kalau ada kesepakatan tentang

pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial berarti mencapai klaim ketepatan (*rightness*) dimana penerapan CSR oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan mengungkapkan CSR yang diasosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan (Sari, 2012). Ketepatan dalam pengungkapan CSR juga sangat perlu seperti, kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, berarti mencapai klaim autentisitas atau kejujuran (*sincerity*), artinya perusahaan harus jujur dalam mengungkapkan pertanggung jawabannya, karena kejujuran dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi maupun kepercayaan masyarakat akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan juga memberikan manfaat untuk mempertahankan dan mendongkrak *brand image* (Juhairi *et al.*, 2016). *Brand image* merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi konsumen terhadap minat beli. Minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Armada *et al.*, 2017). Sedangkan klaim komprehensibilitas (*comprehensibility*) yakni, perusahaan yang mengungkapkan CSRnya mampu menangkap atau menerima dengan baik peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai kewajiban perusahaan tersebut. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang termuat dalam UU No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2c) tentang perseroan terbatas, UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 tentang penanaman modal dan peraturan (BAPEPAM) terkait pemerintah telah mengatur CSR di dalamnya, tetapi dalam UU No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2c) tidak mengatur sejauh mana pengungkapan CSR dilakukan.

2.4 Konsep Keadilan dalam Praktik Akuntansi

Menindaklanjuti kepedulian sosial dan lingkungan, ilmu akuntansi, diharapkan menyajikan pelaporan sosial dan lingkungan pada pelaporan keuangan perusahaan dan menjadikan intisari penting pengambilan kebijakan akuntansi. Mengungkapkan pelaporan keuangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan melalui teologi pembebasan (Saphiro, 2009). Akuntansi memungkinkan untuk berpikir kritis yang berkaitan dengan diri sendiri, bagi profesi dan masyarakat. Teologi membantu profesi akuntan untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sewajarnya dan transparan, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri namun juga untuk dampak masyarakat.

Pada hakikatnya, suatu konsep keadilan tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja, ada banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban mengenai keadilan seperti, Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dworkin, R. Nozick dan Posner, mereka pada masanya telah memberikan jawaban tentang konsep keadilan (Noviani, 2014). Di dalam tahap analisis lingkungan sebagaimana ditentukan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) seperti identifikasi penentuan biaya, mengakui sebagai biaya, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Hakikatnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA Bakaru) membutuhkan banyak debit air untuk mengoperasikan agar dapat menghasilkan energi listrik, di lain sisi, bagi masyarakat air juga menjadi makna yang jauh lebih besar karena terkait dengan budaya, identitas, dan bagian dari mata pencaharian masyarakat. Artinya konsep keadilan pelaporan akuntansi dalam operasi PLTA Bakaru tidak hanya melakukan monopoli atas air ,tetapi hanya sedikit yang dimanfaatkan karena air bagian dari sumber daya yang terbatas .

2.5 Teori Tindakan Strategis dan Komunikatif Jurgen Habermas

Tindakan sosial dibawakan ketika seorang agen bertemu dengan agen lainnya, dalam kondisi seperti itu terjadi apa yang disebut Parsons dengan kontingensi ganda (*Double Contingency*) yang di kutip dalam tulisan Vanderstraeten (2002). Keadaan yang agen pertama inginkan akan bergantung kepada apa yang dia harapkan dari orang kedua dan demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya, agen yang terlibat dalam interaksi dengan agen lain mau tak mau harus mengkoordinasikan rencana tindakan mereka. Setiap interaksi selalu melibatkan problem koordinasi tindakan komunikatif dan tindakan strategis dapat dipandang sebagai dua modus koordinasi sosial.

“The two types of interaction can, to begin with, be distinguished from one another according to respective mechanisms of action coordination in particular, according to whether natural language is employed solely as a medium for transmitting information or whether it also made use of a source of social integration. In the first case I refer to strategic action and in the second communicative action. In the latter case, the consensus achieving force of linguistic processes of reaching understanding (Verständigung) that is, the binding and bonding energies of language itself becomes effective for the coordination of action. In the former case, by contrast, the coordinating effect remains dependence on the influence functioning via non-linguistic activities exerted by the actors on the action situation and on each other”

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya baik tindakan komunikatif maupun strategis menggunakan bahasa sebagai sumber daya. Perbedaannya adalah apabila pada tindakan komunikatif bahasa adalah sumber daya utama yang didayagunakan, pada tindakan strategis bahasa hanya digunakan secara instrumental, tindakan komunikatif partisipan tidak pertama-

tama mengarahkan diri kepada sukses individual; mereka mengejar tujuan individual mereka di bawah kondisi di mana mereka dapat mengharmonisasikan rencana tindakan mereka atas dasar definisi situasi umum.

Kriteria keberhasilan dari tindakan komunikatif adalah tercapainya saling pemahaman di antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal atau dengan kata lain, tindakan komunikatif merupakan modus interaksi yang berorientasi kepada pencapaian pemahaman timbal balik. Pencapaian pemahaman bersama tersebut dapat tercapai ketika seorang pembicara dapat mencapai tujuan *illocutionary* melalui tindak tutur yang dibawakannya, yakni membawakan terciptanya atau dipertahankannya hubungan sosial antara dua orang atau lebih yaitu, tindakan konsensual dan tindakan yang berorientasi kepada Tindakan konsensual adalah kasus ideal dari tindakan komunikatif di mana klaim validitas yang diajukan diasumsikan telah valid dan menjadi konsensus latar belakang karena partisipan komunikasi berbagi tradisi yang sama dan memiliki orientasi yang terintegrasi sehingga memiliki definisi yang sama terhadap situasi. Dalam istilah Jurgen Habermas, partisipan berada dalam ranah *lebenswelt* yang sama.

Tindakan yang berorientasi kepada pemahaman konsensus akan validitas dari suatu tindak tutur yang harus didapatkan dan bukan sekadar diasumsikan. Di antara kedua jenis tindakan tersebut, Jurgen Habermas memberikan perhatian khusus kepada tindakan konsensual karena konstituen tindakan yang berorientasi kepada pemahaman lebih mudah ditemukan dalam kasus tindakan konsensual. Meskipun tindakan yang berorientasi kepada pemahaman biasa ditemukan dalam pertemuan normal namun tindakan konsensuallah yang memiliki prioritas untuk tujuan analisis karena tujuan komunikasi yang berorientasi kepada pemahaman itu sendiri tidak lain. Tindakan strategis merupakan bentuk terbatas dari interaksi sosial sehingga terikat dengan norma-norma masyarakat lokal dan bermain dalam level intersubjektif, namun usaha

mencapai kepentingan pribadi individu sangat menonjol di dalamnya. Tindakan ini bersifat monologis karena merupakan mekanisme kontrol atas proses-proses yang diobjektifkan. Maksudnya, agen yang bertindak strategis memahami perilaku orang lain dalam konteks keteraturan yang dapat diamati sehingga dapat dikontrol secara efektif. Relasi sosial dilihatnya dalam hubungan subjek dan objek di mana kapasitas “objek” (orang lain) untuk menjalin hubungan moral dan melakukan hubungan komunikatif dengan subjek diacuhkan. Norma, nilai, dan standar yang menentukan bagi hubungan ini bukanlah norma-norma konsensual dari tradisi yang dimiliki bersama namun merupakan standar penyesuaian teknis dan kriteria penataan yang efisien bagi realisasi nilai yang tidak dapat dibuktikan secara komunikatif.

Pada praktiknya, tindakan strategis dapat dilaksanakan secara terbuka maupun tersembunyi. Tindakan strategis terbuka adalah tindakan strategis yang bersifat terang-terangan karena baik pembicara maupun pendengar sama-sama melihat dengan jelas bahwa tidak ada sedikit pun usaha yang coba untuk dilakukan demi tercapainya pemahaman bersama yang tulus di antara pihak yang berinteraksi, misalnya seperti memfitnah, menyuap, atau mengancam akan melakukan kekerasan apabila kehendaknya tidak dituruti. Adapun tindakan strategis yang sifatnya tersembunyi lebih sulit dideteksi karena berupa penipuan sehingga lebih subtil sifatnya. Pelaku tindakan strategis yang dengan sadar menipu pihak lain disebut melakukan manipulasi, misalnya dilakukan melalui retorika yang meyakinkan dengan maksud untuk menutupi kenyataan bahwa intensi terdalam dari argumentasinya sesungguhnya bersifat rasional atau mungkin hanya memuaskan kepentingannya pribadi.

Tujuannya untuk meyakinkan pendengar melakukan apa yang dikehendaki atau mempercayai apa yang dikatakan oleh pembicara namun bukan karena alasan rasional, melainkan emosional. Tindakan strategis juga dapat muncul

ketika terjadi apa yang disebut Jurgen Habermas dengan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Ini merupakan situasi ekstrem di mana bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi terdistorsi secara dalam sedemikian sehingga beberapa isu penting tidak dapat diartikulasikan secara penuh dan koheren, sehingga persetujuan pun mustahil didapatkan. Dalam komunikasi yang terdistorsi secara sistematis, baik pembicara maupun pendengar sama-sama tidak sadar bahwa mereka telah terjat ke dalam perangkap tindakan strategis. Meskipun dalam tindakan strategis rekan dialog objektifikasi sedemikian rupa, pada kenyataannya objektifitas manusia tidak dapat sepenuhnya terjadi, bersikukuh bahwa manusia yang diperlakukan sebagai objek bagaimanapun tetap mempertahankan kapasitas hubungan komunikatifnya dan tetap menjadi partner atau rival potensial dalam interaksi. Hal ini akan tinggal tetap selama tradisi budaya masyarakat tidak berubah secara radikal, yaitu selama proses sosialisasi tetap terikat dengan klaim kebenaran pernyataan dan dapat disahkannya sejumlah norma. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa meskipun tindakan strategis dapat dikategorikan sebagai suatu modus interaksi, namun interaksi tersebut tidak dilakukan secara tulus (*genuine*). Suatu interaksi yang dilakukan secara tulus adalah interaksi yang dilakukan dalam tindakan komunikatif.

2.6 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Paparan kebijakan kementerian BUMN tentang CSR tahun 2010 pada acara rapat koordinasi tentang penguatan kerjasama pengelolaan peluang kerja dan peluang usaha (Wasrin, 2010), tujuannya adalah agar perusahaan, masyarakat termasuk karyawan, konsumen, komunitas lokal, supplier, investor, kreditor, dan lingkungan bisa hidup berdampingan (Ummah, 2018). Selaku pembinaan kemitraan dan bina lingkungan menyebutkan bahwa perkembangan konsep

tanggung jawab sosial perusahaan pertama kali muncul saat diterbitkannya buku karya Howard R Bowe yang berjudul *Social Responsibility Of The Businessman* pada tahun 1953 yang selanjutnya Howard R Bowen dikenal sebagai bapak CSR.

Banyak sekali prinsip-prinsip terkait CSR yang telah berkembang (Luhglatno, 2007), *corporate social responsibility* merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dijelaskan bahwa penerapan CSR merupakan bentuk implementasi GCG (*good corporate governance*) perusahaan karena salah satu prinsip GCG adalah masalah tanggung jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya BUMN di Indonesia diatur berdasarkan peraturan menteri negara BUMN Per-05/MBU/2007 pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa program bina lingkungan yang selanjutnya disebut program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dengan adanya regulasi terkait penerapan tanggung jawab sosial bagi BUMN tersebut mengasumsikan betapa pentingnya praktek tanggung jawab sosial tersebut sehingga BUMN pun sebagai unit usaha milik negara juga dituntut menerapkan tanggung jawab sosial. Kewajiban diterapkannya tanggung jawab sosial bagi perusahaan juga telah diatur dalam

undang-undang No. 40/2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2.7 Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)

PT. PLN (persero) selain sebagai perseroan yang bergerak dibidang bisnis penyedia tenaga listrik di Indonesia juga merupakan salah satu BUMN (badan usaha milik negara). Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sehingga mengharuskan PT. PLN (Persero) melakukan tanggung jawab sosial serta melaporkannya.

Regulasi berkenaan dengan keharusan dilaksanakannya program tanggung jawab sosial oleh BUMN dalam hal ini bernama program kemitraan dan bina sosial (PKBL), pedoman akuntansinya pun telah diatur dalam surat edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang penetapan pedoman akuntansi program (PKBL) Revisi tahun 2012 dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa tujuan pedoman akuntansi PKBL ini merupakan pedoman bagi unit PKBL dalam rangka menyelenggarakan pencatatan atas transaksi program. Acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan unit PKBL menggunakan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan pernyataan standar akuntansi keuangan tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Digunakannya dua acuan tersebut atas dasar pertimbangan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN dimaksudkan untuk digunakan

oleh unit PKBL BUMN. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam (SAK ETAP) bahwa standar akuntansi tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dimana merupakan entitas yakni, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dalam hal ini entitas yang dimaksud adalah unit PKBL dan pengguna eksternal yang dimaksud adalah mitra PKBL terkait.